KEGIATAN DKPP RI TA. 2026

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	OUTCOME	JADWAL PELAKSANAAN	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
1.	Layanan Kearsipan	Sub Bagian Pengelolaan Kearsipan, Data, dan Sistem Informasi	Keputusan JRA	Terwujudnya pengelolaan arsip yang lebih tertib dan sesuai ketentuan melalui penyusunan atau penetapan Jadwal Retensi Arsip (JRA), sehingga arsip dapat disimpan, dipelihara, dan ditindaklanjuti sesuai masa retensinya	Februari, Juni, Juli	64,125,000	APBN
2.	Fasilitasi Pengelolaan Kehumasan	Bagian Humas	Publikasi Website dan Media Sosial	Informasi mengenai kegiatan, kebijakan, dan kinerja DKPP dapat dipublikasikan secara rutin melalui website dan media sosial resmi, sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh informasi yang benar dan terbaru.	Sepanjang Tahun 2026	32,305,000	APBN
3.	Fasilitasi Pemberitaan Kinerja DKPP melalui Konfersi Pers dan Diskusi Media	Bagian Humas	Keterbukaan Informasi Publik melalui Konferensi Pers	Informasi mengenai kinerja dan kegiatan DKPP dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui konferensi pers dan diskusi dengan media, sehingga informasi yang diterima publik lebih jelas, akurat, dan mudah dipahami.	Mei, Oktober	116,480,000	APBN

4.	Fasilitasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Sub Bagian Pengelolaan Kearsipan, Data, dan Sistem Informasi	Peraturan PPID	Tersedianya pedoman atau peraturan PPID yang mendukung pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik, sehingga permohonan informasi dapat ditangani secara lebih tertib, jelas, dan sesuai ketentuan yang berlaku.	April, Juli	221,665,000	APBN
5.	Pengembangan dan Pengelolaan Portal dan Website DKPP	Sub Bagian Pengelolaan Kearsipan, Data, dan Sistem Informasi	SiEtik	Tersedianya sistem atau website dalam mendukung alur pengaduan dari Masyarakat terhadap KEPP sehinggal lebih efektif dan efisien	Februari, April, Juni, September	487,520,000	APBN
6.	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Aplikasi Sistem Informasi Sekretariat DKPP yang Terintegrasi	Sub Bagian Pengelolaan Kearsipan, Data, dan Sistem Informasi	Monitoring Media lebih terarah	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap aplikasi sistem informasi Sekretariat DKPP yang terintegrasi, sehingga kendala dan kebutuhan perbaikan dapat diketahui serta pemantauan media dapat dilakukan dengan lebih terarah.	September, Oktober	37,430,000	APBN
7.	Fasilitasi Citra Positif Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Bagian Humas, Data, dan Teknologi Informasi	Jurnal Etika Melembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penegakan kode etik penyelenggara pemilu melalui penerbitan atau pengembangan Jurnal Etika Melembaga, sekaligus mendukung terbentuknya citra positif DKPP.	Maret, Juni, Agustus, September, Oktober	367,415,000	APBN

8.	Fasilitasi Pemberitaan DKPP melalui Kemitraan Strategis Humas dan Media Massa	Bagian Humas, Data, dan Teknologi Informasi		Terjalinnya kerja sama yang lebih baik dengan humas dan media massa untuk menyebarluaskan pemberitaan mengenai kegiatan serta kinerja DKPP secara lebih luas, akurat, dan berimbang kepada masyarakat.	Juni-Juli	432,404,000	APBN
9.	Festival Etik	Bagian Humas, Data, dan Teknologi Informasi			April – Juni	365,977,760	APBN
10.	Dialog Interaktif (PODCAST) DKPP RI	Bagian Humas, Data, dan Teknologi Informasi		Tersedianya sarana komunikasi dan edukasi publik melalui podcast DKPP RI yang membahas isu, tugas, dan kinerja DKPP dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih menarik dan mudah diakses.	Maret- Sekarang	378,421,200	APBN
11.	Fasilitasi Tata Kelola Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi DKPP	Sub Bagian Pengelolaan Kearsipan, Data, dan Sistem Informasi		Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi DKPP secara lebih terencana, terkoordinasi, dan sesuai kebutuhan organisasi, sehingga dapat menunjang kelancaran pekerjaan serta penyampaian informasi.	Agustus, September, Oktober	16,795,000	APBN
12.	Layanan Sarana dan Prasarana DKPP RI dengan kegiatan Pengadaan	Sub Bagian Perlengkapan	1 Layanan	Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana internal DKPP RI yang memadai,	1 Tahun	2.180.833.868	Rupiah Murni APBN

	Sarana dan Prasarana Internal DKPP RI	dan Rumah Tangga		berkualitas, dan sesuai kebutuhan guna mendukung kelancaran operasional serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.			
13.	Layanan Keprotokolan, yang terdiri dari kegiatan: a. Penyelenggaraan Kegaitan keprotokolan DKPP RI b. Pelaksanaan Tugas Protokol dalam ranga Koordinasi Acara dan Fasilitasi Keprotokolan DKPP RI	Sub bagian Protokol dan Tata Usaha	1 Layanan	a. Terwujudnya penyelenggaraan kegiatan keprotokolan DKPP RI yang tertib, lancar, profesional, dan sesuai dengan ketentuan keprotokolan yang berlaku. b. Terwujudnya koordinasi acara dan fasilitasi keprotokolan yang efektif, terintegrasi, dan optimal guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kedinasan serta meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan DKPP RI.	1 Tahun	89.566.000	Rupiah Murni APBN
14.	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, yang terdiri dari kegiatan: a. Konsolidasi dan Koordinasi Perencanaan DKPP b. Fasilitasi dan Koordinasi Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Bersama DPR RI	Sub Bagian Perencanaan	1 Layanan	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran DKPP yang terarah, terukur, efektif, efisien, dan selaras dengan prioritas serta target kinerja organisasi. Dengan outcome kegiatan antara lain: a. Terwujudnya sinergi dan keselarasan perencanaan program dan anggaran	1 Tahun	354.706.000	Rupiah Murni APBN

	c. Penyusunan dan Penajaman Rencana Kerja serta Program DKPP			antarunit kerja di lingkungan DKPP. b. Terwujudnya dukungan perencanaan dan penganggaran DKPP yang terkoordinasi, akuntabel, serta selaras dengan hasil pembahasan dan arahan DPR RI. c. Terwujudnya rencana kerja dan program DKPP yang berkualitas, terukur, berbasis prioritas, dan berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi.			
15.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, yang terdiri dari kegiatan: a. Penyusunan Laporan dan Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan DKPP	Sub Bagian Perencanaan	1 Layanan	Terwujudnya pengendalian dan peningkatan kinerja pelaksanaan program dan anggaran DKPP melalui pemantauan dan evaluasi yang berkala, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian target kinerja. Dengan outcome kegiatan terwujudnya pelaporan kinerja serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan DKPP yang akuntabel sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja berkelanjutan.	1 Tahun	203.239.000	Rupiah Murni APBN

16.	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan, yang terdiri dari kegiatan: a. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Administrasi Keuangan b. Rekonsiliasi Data Keuangan c. Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit d. Penguatan Literasi dan Pedoman Pengelolaan Keuangan DKPP	Sub Bagian Keuangan	1 Layanan	a. Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Meningkatnya akurasi, kesesuaian, dan keandalan data keuangan guna mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel. c. Meningkatnya efektivitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan audit guna memperkuat kepatuhan, pengendalian internal, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. d. Meningkatnya pemahaman, kompetensi, dan kepatuhan aparatur terhadap pedoman serta ketentuan pengelolaan keuangan guna mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional dan akuntabel.	1 Tahun	487.062.000	Rupiah Murni APBN
17.	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan, yang terdiri dari kegiatan:	Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	1 Layanan	a. Terwujudnya pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan kantor yang tertib, efektif, efisien,	1 Tahun	1.048.795.000	Rupiah Murni APBN

	a. Fasilitasi dan Koordinasi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan Kantor DKPP b. Fasilitasi dan Koordinasi Pengamanan Kantor DKPP c. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan BMN d. Peningkatan Literasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)			dan optimal guna mendukung kelancaran operasional serta kenyamanan lingkungan kerja DKPP RI. b. Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan perlindungan lingkungan kantor, pegawai, serta aset DKPP RI guna menciptakan suasana kerja yang aman, kondusif, dan berkelanjutan. c. Meningkatnya tertib administrasi, optimalisasi pemanfaatan, pengamanan, dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan kerja guna mendukung terciptanya lingkungan kantor yang bersih, sehat, dan produktif.			
18.	Pelayanan Administrasi Ketatausahaan, yang terdiri dari kegiatan Pengelolaan	Sub Bagian TU dan Perencanaan	1 Layanan	Terwujudnya pengelolaan arsip dan persuratan pimpinan DKPP RI yang tertib, efektif, efisien, sistematis, dan	1 Tahun	47.280.000	

	arsip dan persuratan TU Pimpinan DKPP RI			akuntabel guna mendukung kelancaran administrasi serta pelaksanaan tugas kedinasan pimpinan DKPP RI.			
19.	Penguatan Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan, Sekretariat DKPP	1 Laporan	terwujudnya sistem penanganan pengaduan kode etik yang terintegrasi dan transparan melalui sinergi *stakeholder*, meningkatnya kompetensi teknis para pengkaji DKPP dalam menganalisis berkas aduan secara akurat, terciptanya kesiapan sistem kelembagaan menuju Pemilu Serentak 2029, serta terwujudnya penguatan literasi publik dan pengayaan doktrin peradilan etik melalui penyusunan Trilogi Buku Etika Pemilu	FGD I “Sinergitas Stakeholder dalam membangun Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu” 12 maret 2026 Fullboard “Strategi Peningkatan Keterampilan pengkaji dalam mengidentifikasi dan menganalisa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu” 6-8 April 2026 FGD II “Penguatan Kelembagaan dan Sistem		

					Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Menuju Pemilu Serentak 2029” 6 Agustus 2026 FGD III “Penjaringan Materi dan Penyusunan Kerangka Trilogi Buku: Etika Hukum Acara dan Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu” 14 Agustus 2026 Fullboard “Peningkatan Literasi Pemahaman Pengaduan Kode Etik Penyelenggara Pemilu “ 21-23 Oktober 2026		
20.	Diseminasi Penguatan Kapasitas TPD	Bagian Teknis Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah	1 Laporan	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Desiminasi TPD Wilayah 1 Sumsel 20 - 22 April 2026	2,990,621,000	APBN

		Sekretariat DKPP		sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada Lembaga.	Desiminasi TPD Wilayah 2 Sulsel 10 - 12 Mei 2026 Desiminasi TPD Wilayah 3 NTB 7 - 9 Juni 2026		
21.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bimtek dan Pelantikan Tim Pemeriksa Daerah	Bagian Teknis Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah Sekretariat DKPP	1 Laporan	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada Lembaga.	4 - 6 November 2026	4,036,955,000	APBN
22.	Monitoring dan Evaluasi Tim Pemeriksa Daerah	Bagian Teknis Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah Sekretariat DKPP	1 Laporan	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada Lembaga.	Monev Provinsi Lampung 20-22 Agustus 2026 Monev Provinsi Bali 24 – 26 September 2026	327,774,000	APBN
23.	Fasilitasi Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Bagian Fasilitasi Teknis Persidangan dan Teknis Putusan, Sekretariat DKPP	1 Layanan, untuk Perkara/Sidang	Terciptanya kepastian hukum atas seluruh perkara dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada Lembaga.	1. Sidang No. 200-PKE-DKPP/X/2025 Tanggal 21 Januari 2026 di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 2. Sidang No. 206-PKE-DKPP/XII/20254		

					Februari 2026 Tanggal 4 Februari 2026 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 3. Sidang No. 207-PKE-DKPP/XII/2025 Tanggal 2 Februari 2026 di Ruang Sidang Utama DKPP 4. Sidang No. 1-PKE-DKPP/I/2026 Tanggal 25 Februari 2026 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara 5. Sidang No. 2-PKE-DKPP/I/2026 Tanggal 27 Februari 2026 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan 6. Sidang No. 5-PKE-		

					DKPP/III/2026 Tanggal 14 April 2026 di Ruang Sidang Polda Papua 7. Sidang No. 3-PKE-DKPP/III/2026 Tanggal 15 April 2026 di Bawaslu Provinsi Riau 8. Sidang No. 6-PKE-DKPP/III/2026 Tanggal 22 April 2026 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 9. Sidang No. 7-PKE-DKPP/III/2026 Tanggal Tanggal 29 April 2026 di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 10. Sidang No. 4-PKE-DKPP/III/2026 Tanggal 05 Mei 2026 di Bawaslu		

					Provinsi Papua Barat Daya 11. Sidang No. 8-PKE-DKPP/IV/2026 Tanggal 21 Mei 2026 di Ruang Sidang Polda Papua 12. Sidang No. 10-PKE-DKPP/VI/2026 Tanggal 29 Juni 2026 di Ruang Sidang DKKPP 13. Sidang No. 09-PKE-DKPP/VI/2026 Tanggal 15 Juli 2026 di Ruang Sidang Polda Papua 14. 11-PKE-DKPP/VI/2026 Tanggal 21 Juli 2026 di Ruang Sidang DKPP 15. 12-PKE-DKPP/VII/2026 Tanggal 12 Agustus 2026 di Ruang Sidang		

					Bawaslu Provinsi Jawa Timur 16. 14-PKE-DKPP/VII/2026 Tanggal 12 Agustus 2026 di Ruang Sidang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 17. 13-PKE-DKPP/VII/2026 Tanggal 13 Agustus 2026 di Ruang Sidang Utama DKPP		
24.	Layanan Penilaian Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu	Sub Bagian Hukum Kerja Sama dan Kepegawaian	KPU, Bawaslu se-Indonesia 38 Provinsi	Bahan pembinaan dan bimbingan teknis untuk penyelenggara yang nilainya rendah, rekomendasi perbaikan regulasi internal KPU/Bawaslu. Pemetaan Tingkat kepatuhan dan bisa terlihat daerah mana dan tingkatan mana yang paling banyak pelanggaran kode etik	Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November	5.309.970.000	APBN
25.	Persiapan Pemetaan Nilai Indeks Kepatuhan Etika pada Seluruh Instansi Penyelenggara Pemilu	Sub Bagian Hukum Kerja Sama dan Kepegawaian	Penelitin	Untuk mengetahui daerah mana yang histori pelanggaran etiknya tinggi, instansi mana yang masuk kategori rawan,	Januari, September, Oktober,	3.407.731.000	APBN

				sedang dan aman berdasarkan data aduan, siapa yang perlu dilibatkan untuk validasi data	November dan Desember		
26.	Kerja Sama DKPP	Sub Bagian Hukum Kerja Sama dan Kepegawaian	universitas	PKS, MOU dan kesepakatan formal dengan universitas	Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November	1.351.317.000	APBN
27.	Pendidikan Etik Penyelenggara Pemilu	Sub Bagian Hukum Kerja Sama dan Kepegawaian	KPU dan Bawaslu	Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap kode etik yang ditandai dengan meningkatnya skor indeks Kepatuhan Etik dan menurunnta jumlah pelanggaran etik berat di seluruh tingkatan penyelenggara	Maret, Agustus, September dan November	550.922.000	APBN
28.	Pengelolaan Kepegawaian	Bagian Kepegawaian	Seluruh pegawain sekterariat DKPP	Terwujudnya ASN yang berintegritas, professional, netral dan berkinerja tinggi dalam mendukung terwujudnya DKPP yang Kredibel, Transparan	Januari, Maret, April,	648.174.000	APBN
29.	Layanan Hukum	Bagian Hukum		Memberikan kepastian hukum dalam mendukung tugas dan kewenangan DKPP	Mei	2.025.000	APBN

Note: 26/10/2026